



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT
DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 4 serta untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu melaksanakan verifikasi pada pelaksana ujian;
- b. bahwa Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I) sebagaimana tersebut dalam lampiran telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Ujian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 946/BA/KS/LKPP/02/2016;
5. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 1220/BA/KS/LKPP/03/2016;
6. Berita Acara Rapat Komite Sertifikasi Nomor 1612/BA/KS/LKPP/04/2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 (dua) Lampiran I dan II Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana Lampiran I hanya dapat memfasilitasi pelaksanaan ujian bagi pegawai internal pada lingkup kerja unit organisasi K/L/Pemda/I selama masa berlaku penetapan.

- KETIGA : Status penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan untuk jangka waktu selama masa berlaku penetapan Akreditasi pada Direktorat Pelatihan Kompetensi.
- KEEMPAT : Perpanjangan status penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diusulkan oleh pimpinan unit organisasi Pelaksana Ujian.
- KELIMA : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan ujian tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- KEENAM : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dicabut status penetapannya, dapat mengajukan kembali permohonan verifikasi sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pencabutan Pelaksana Ujian.
- KETUJUH : LKPP melaksanakan surveilan kepada Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku penetapan.
- KEDELAPAN : Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mengirimkan Laporan Kegiatan pelaksanaan ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setiap 6 (enam) bulan kepada Direktorat Sertifikasi Profesi.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dharma Nursani



Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
 SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA UJIAN
 SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT
 DASAR PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH.
 NOMOR : 36 TAHUN 2016
 TANGGAL : 21, April 2016

DAFTAR PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama Unit Organisasi K/L/Pemda/I	Alamat Domisili	Penanggung Jawab
1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jalan Raya Gandul 16215 Depok, Jawa Barat	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Jalan MH. Thamrin No. 8, Gedung BPPT II, Lantai 18, Jakarta Kota, Jakarta Pusat	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jalan Windu No. 26, Bandung Kota, Bandung, Jawa Barat	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4	Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Jalan Raya Lemahabang No. 01, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
5	Badan Pendidikan dan	Jalan Raya Lintas	Kepala Badan Pendidikan

	Pelatihan Pemerintah Provinsi Banten	Timur KM. 4, Karang Tanjung – Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten	dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Banten
6	Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Jalan R. A. Kartini No. 2, Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba
7	Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara	Jalan Pandan Sari, Tol Jagorawi KM. 45.2, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
8	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Jalan Chairil Anwar No. 8A, Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan	Jalan T.B. Simatupang No. 122, Pinang Baris, MedanKota, Medan, Sumatera Utara	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
10	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Jalan Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11	Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah Kabupaten Mamuju Utara	Jalan Ir. Soekarno – Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara	Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah Kabupaten Mamuju Utara

12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	Jalan Pahlawan No. 8, Kalibata, Jakarta Selatan	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
13	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan	Jalan Jati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jalan Abdul Muis No. 66, Gedung Teknis Lantai 8, Jakarta	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Markas Besar Polisi Republik Indonesia	Jalan Ciputat Raya No. 40, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Markas Besar Polisi Republik Indonesia
16	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado	Jalan Mr. A. A. Maramis KM. 9, Paniki Bawah, Manado	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado
17	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar	Jalan Raya Mengwi KM. 14, Beringkit – Mengwitani, Kabupaten Badung	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Denpasar
18	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo	Jalan PB. Sudirman No. 1, Situbondo	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo
19	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun	Jalan Sutomo No. 1, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun

20	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkal Pinang	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
21	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	Halan Trikora No. 1, Bukit Leoteglas, Weda	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
22	Biro Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum	Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Komisi Pemilihan Umum
23	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jalan Raya Kelapa Dua No. 49, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika
24	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Jalan Titian Puspa Utama Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah
25	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Lombok Barat	Jalan Soekarno – Hatta, Giri Menang	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Lombok Barat
26	Balai Pendidikan dan Pelatihan I Medan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Sakti Lubis No. 7A, Medan	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan I Medan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27	Badan Kepegawaian dan Pendidikan,	Jalan Mataram No. 2, Denpasar	Kepala Badan Kepegawaian dan

	Pelatihan Pemerintah Kota Denpasar		Pendidikan, Pelatihan Pemerintah Kota Denpasar
--	---------------------------------------	--	--

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dharma Nursani



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT
DASAR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 36 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 April 2016

DAFTAR PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN TINGKAT DASAR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama Unit Organisasi	Alamat Domisili	Penanggung Jawab
1	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)	Jalan Kayu Putih II No. 7, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Ketua Umum Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)
2	Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	Jalan Menteng Raya No. 9 – 19, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Direktur Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Yogyakarta	Jalan Gedong Kuning No. 140, Yogyakarta, DI Yogyakarta	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Yogyakarta
4	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Dr. Soeparno Karangwangkal, Purwokerto	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman
5	Lembaga Pendidikan dan	Komplek Pertokoan Modena Residence	Direktur Utama Lembaga Pendidikan

	Pelatihan Madani (LP2M)	Blok A1 No. 14, Batam	dan Pelatihan Madani (LP2M)
--	----------------------------	--------------------------	--------------------------------

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Dharma Nursani